

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan penduduk yang terjadi di Indonesia menjadi isu penting yang selalu menjadi pembahasan dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan di suatu negara. Pertumbuhan penduduk terus mengalami kenaikan pada setiap tahunnya dan terus bertambah secara signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Populasi penduduk yang semakin besar dan terus bertambah menjadi tantangan bagi negara. Fenomena pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali akan berdampak pada berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi dan lingkungan. Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali menjadi isu yang harus ditangani dengan tepat. Pertumbuhan penduduk menjadi tantangan utama yang dihadapi negara-negara berkembang salah satunya yaitu Indonesia.

Negara-negara berkembang memiliki karakteristik yang sama dimana mengalami pertumbuhan penduduk secara signifikan. Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar dengan peningkatan jumlah penduduk yang terjadi secara konsisten setiap tahunnya. Menurut World Population Review, Indonesia menduduki peringkat keempat dengan penduduk terbanyak setelah India, China dan Amerika Serikat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk Indonesia pada tahun 2024 mencapai 281.603,8 juta jiwa dan mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebanyak 1,11%. Pertumbuhan penduduk didorong karena berbagai faktor diantaranya angka kelahiran yang relatif tinggi,

peningkatan harapan hidup dan urbanisasi yang turut berkontribusi dalam pertumbuhan penduduk.

Pertumbuhan penduduk yang terjadi dengan pesat memberikan dampak positif sekaligus memberikan dampak negatif bagi suatu negara (Tampubolon, 2022) . Pada satu sisi, laju pertumbuhan penduduk memberikan dampak positif pada bonus demografi dengan peningkatan jumlah penduduk usia produktif lebih besar daripada usia non-produktif. Namun, di lain sisi laju pertumbuhan penduduk memberi dampak negatif dan tantangan pada penyediaan lapangan pekerjaan, fasilitas, pendidikan serta infrastruktur. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari adanya pertumbuhan penduduk yaitu masalah persampahan.

Pertumbuhan penduduk yang tinggi terjadi di perkotaan ini disebabkan oleh kegiatan ekonomi di perkotaan yang sangat tinggi dan produktif (Kuswartojo, 2005). Peningkatan jumlah penduduk pada suatu perkotaan akan memberikan konsekuensi terhadap peningkatan kebutuhan akan sarana dan prasarana bagi masyarakat. Salah satu komponen utama prasarana dalam menunjang kebutuhan masyarakat berada di sektor persampahan. Pertumbuhan penduduk di perkotaan akan memberikan dampak pada peningkatan jumlah sampah setiap harinya.

Jumlah penduduk yang semakin bertambah setiap tahunnya akan memberi dampak pada peningkatan volume sampah dan akan menyebabkan kerusakan lingkungan jika sampah yang dihasilkan dari aktivitas manusia sehari-hari tidak dapat ditangani dengan baik. Menurut data SIPSN, timbulan sampah di Indonesia pada tahun 2023 sebesar 69.9 juta ton. Berdasarkan komposisi sampah yang ada di

Indonesia, didominasi oleh sampah sisa makanan sebesar 41.60% dan sampah plastik sebesar 18.71%. Peningkatan volume sampah akan terus bertambah seiring dengan terjadinya pertumbuhan penduduk. Peningkatan jumlah sampah yang tidak terkendali akan mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan dan akan berdampak langsung pada masyarakat.

Permasalahan sampah selalu menjadi topik hangat yang dibicarakan di lingkungan perkotaan. Terlebih lagi, kota menjadi tempat pilihan bagi masyarakat untuk tinggal atau menetap, mencari pekerjaan dan memperbaiki taraf kehidupan. Banyak orang lebih memilih tinggal di perkotaan dengan alasan kemudahan akses dibandingkan tinggal di pedesaan. Namun, banyaknya orang yang memilih tinggal di perkotaan juga akan menimbulkan masalah yang semakin kompleks. Semakin bertambahnya jumlah penduduk pada suatu daerah maka akan menimbulkan masalah-masalah yang akan terjadi di daerah tersebut salah satunya masalah persampahan yang terjadi di Kota Salatiga.

Kota Salatiga menjadi salah satu kota pilihan bagi masyarakat untuk menjadi tempat tinggal dan sebagai kota tujuan orang untuk menghabiskan masa tuanya. Hasil sensus penduduk yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga pada tahun 2021 menunjukkan jumlah penduduk di Kota Salatiga sebanyak 196.440 ribu jiwa dan mengalami peningkatan pada tahun 2022 sebanyak 200.220 ribu jiwa. Angka ini mengalami peningkatan pada tahun 2023 sebanyak 201.369 ribu jiwa tetapi mengalami penurunan jumlah penduduk pada tahun 2024. Data pada tabel menunjukkan adanya peningkatan jumlah penduduk yang ada di Kota Salatiga dari tahun 2021-2025. Peningkatan jumlah

penduduk di Salatiga akan terus mengalami kenaikan pada setiap tahunnya yang mendorong timbulnya persoalan-persoalan baru.

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Kota Salatiga per Kecamatan

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)				
	2021	2022	2023	2024	2025
Argomulyo	50.264	51.542	52.045	51.376	51.573
Tingkir	46.838	47.699	48.106	47.206	47.256
Sidomukti	45.054	45.764	46.125	45.634	45.714
Sidorejo	54.284	55.215	55.093	54.755	54.807
Jumlah	196.440	200.220	201.369	198.971	199.350

Sumber: Publikasi Dataku Kota Salatiga Tahun 2025

Peningkatan jumlah penduduk di Salatiga akan dibarengi dengan peningkatan jumlah sampah yang dihasilkan dari aktivitas manusia sehari-hari. Banyaknya masyarakat yang tinggal di Salatiga menjadi pendukung peningkatan volume sampah. Data dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga volume produksi sampah setiap harinya bisa mencapai 80 ton/hari atau 385m³/ hari yang dihasilkan dari penduduk baik dari perumahan, pasar, dan sebagainya yang menunjang penambahan volume produksi sampah setiap hari. Banyaknya produksi sampah akan menimbulkan persoalan di masyarakat mengingat bahwa sampah yang dihasilkan masyarakat juga harus dibuang. Sampah yang harus dibuang memerlukan penyediaan tempat yang layak untuk dapat menampung peningkatan volume sampah setiap harinya. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) menjadi tempat yang digunakan untuk menampung sampah yang dihasilkan. TPA Ngronggo menjadi satu-satunya tempat pembuangan akhir yang dipilih oleh Pemerintah Kota Salatiga untuk menampung sampah masyarakat Kota Salatiga setiap hari.

TPA Ngronggo menjadi tempat pembuangan akhir sampah di Kota Salatiga, yang berada di Kelurahan Kumpulrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga dengan kapasitas seluas 5,4 Ha. TPA Ngronggo beroperasi dengan sistem *control landfill* yang digunakan sampai saat ini sehingga menciptakan gunung sampah dengan ketinggian 15 m. Volume sampah yang diproduksi setiap harinya mencapai 80 ton/ hari bahkan akan bertambah jika hari libur/ hari raya yang seringkali menimbulkan persoalan pada daya tampung maksimal dari TPA Ngronggo. Kelebihan muatan sampah yang diterima TPA menjadi suatu persoalan yang harus diselesaikan. Permasalahan sampah akan selalu hadir jika penanganan sampah tidak dilakukan dengan baik yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Permasalahan sampah pada dasarnya terdiri dari 3 faktor utama yaitu aspek populasi, ketersediaan lahan dan infrastruktur.

Tabel 1.2
Timbulan Sampah Kota Salatiga

Tahun	Timbulan Sampah Harian (ton)	Timbulan Sampah Tahunan (ton)
2020	114.03	41.620
2021	112.24	40.969
2022	114.16	41.668
2023	116.43	42.496
2024	116.79	42.629

Sumber : Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) 2024

Berdasarkan tabel tersebut, menunjukkan adanya peningkatan timbulan sampah yang terus bertambah setiap hari dan setiap tahunnya. Salah satu permasalahan yang terjadi di TPA Ngronggo adalah pemenuhan ruang untuk menampung sampah yang dihasilkan setiap harinya. Saat ini, TPA Ngronggo telah

mengalami *overload capacity* karena banyaknya volume sampah yang ditampung oleh TPA setiap harinya melebihi kapasitas. Munculnya permasalahan *overload capacity* ini terjadi karena tidak berjalannya penanganan sampah dengan optimal. Adanya permasalahan *overload capacity* yang terjadi di TPA Ngronggo mengharuskan pemerintah Kota Salatiga untuk mengambil langkah yang tepat untuk menangani sampah karena sampah akan terus berdatangan setiap harinya. Sehingga, pemerintah berencana untuk melakukan perluasan TPA guna mengurangi sampah yang kian menumpuk setiap harinya.

Permasalahan yang terjadi di TPA Ngronggo Kota Salatiga ini, menjadi topik yang sedang hangat diperbincangkan karena kondisinya yang memprihatinkan. Berdasarkan berita yang dirilis oleh [Lingkarjateng.id](http://lingkarjateng.id), daya tampung TPA saat ini sudah menurun sehingga warga di luar wilayah Kota Salatiga dilarang untuk membuang sampah di TPA Ngronggo. Selain itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Salatiga menyatakan bahwa umur TPA hanya tersisa sekitar tiga tahun sebelum *overload* (Rasikafm.com). Daya tampung TPA yang menipis disebabkan karena volume sampah yang dibuang ke TPA mencapai puluhan ton per hari (Lingkarjateng.id).

Permasalahan sampah yang tidak ditangani dengan baik akan menimbulkan konflik antara masyarakat dengan pemerintah karena adanya ketidaksepahaman maksud dan tujuan. Penanganan sampah yang tidak optimal akan menyebabkan penumpukan sampah di TPA dimana hal ini akan memberikan dampak bagi masyarakat di sekitarnya. Penumpukan yang terjadi akan memicu ketidaknyamanan warga sekitar bahkan akan berdampak bagi kesehatan warga.

Ketidaknyamanan yang dirasakan warga akan memicu timbulnya konflik. Konflik akan terjadi antara pemerintah dengan warga apabila tidak ada kesepakatan kedua pihak untuk melakukan penanganan sampah dengan optimal. Keberadaan TPA di dekat pemukiman warga memberikan dampak pada kehidupan sehari-hari warga. Perluasan TPA yang direncanakan untuk mengurangi sampah yang menumpuk memicu terjadinya penolakan dari warga karena warga merasa tidak menghendaki dilakukan perluasan. Wacana perluasan menuai penolakan yang menyebabkan terjadinya konflik antara masyarakat dengan pemerintah.

Konflik dapat timbul di masyarakat karena adanya permasalahan-permasalahan yang memberi dampak negatif bagi kehidupan masyarakat. Konflik sosial seringkali dipicu oleh beberapa faktor diantaranya ketidakadilan, ketidakpuasan, ketimpangan sumber daya, kebijakan yang merugikan pihak tertentu dan suara masyarakat yang tidak didengar oleh pemerintah. Konflik yang timbul dari wacana perluasan TPA, berkaitan dengan ketidakpuasan masyarakat sekitar terhadap penanganan sampah dan dampak negatif yang dihasilkan dari tumpukan sampah, seperti menyebabkan terjadinya pencemaran udara, pencemaran air dan memberikan ancaman terhadap kesehatan warga. Konflik yang terjadi dari adanya wacana perluasan TPA Ngronggo yang akan dilakukan oleh pemerintah menjadi akibat dari adanya ketidaksepahaman tujuan antara warga dengan pemerintah.

Kondisi TPA Ngronggo saat ini bagaikan pemandangan gunung yang menjulang tinggi, tetapi beraroma tidak sedap yang bahkan aromanya dapat tercium dari jarak yang cukup jauh. Aroma tidak sedap yang berasal dari gunung sampah

ini menjadi keresahan bagi warga sekitar TPA Ngronggo. Bukan hanya bau yang tidak sedap, melainkan ketika musim hujan lalat yang berasal dari TPA Ngronggo masuk ke wilayah pemukiman penduduk dimana hal ini mengganggu aktivitas sebagian besar warga. Warga sekitar khawatir jika dilakukan perluasan pada TPA Ngronggo akan semakin memperparah keadaan. Tidak hanya menyebabkan polusi udara, keberadaan TPA Ngronggo juga menimbulkan masalah lain yaitu polusi air pada sumur-sumur warga yang disebabkan dari limbah dan air yang berasal dari sampah. Sumur-sumur milik warga tercemar karena limbah sampah sehingga air sumur warga menjadi keruh. Belum ada penanganan baik dari pihak pengelola TPA Ngronggo ataupun pemerintah untuk menangani polusi air dan keresahan warga.

Adanya wacana perluasan di TPA Ngronggo menimbulkan konflik antara masyarakat sekitar dengan pemerintah. Warga sekitar bersikeras untuk tidak dilakukan perluasan di TPA Ngronggo. Warga merasa dengan kondisi TPA saat ini sudah menimbulkan banyak dampak negatif dan keresahan bahkan kerugian bagi masyarakat sekitar. Konflik antara pemerintah dengan masyarakat sekitar akan terus terjadi jika perluasan ini dilakukan tanpa melibatkan persetujuan dari masyarakat. Berdasarkan berita yang dirilis oleh Redaksi Dinamika, perluasan TPA Ngronggo menyebabkan munculnya pro-kontra dikalangan masyarakat. Beberapa warga tidak menginginkan perluasan TPA karena polusi yang bersumber dari TPA semakin parah.

Bagi pemerintah, perluasan TPA diperlukan untuk dapat mengatasi keterbatasan kapasitas daya tampung TPA karena peningkatan volume sampah seiring pertumbuhan penduduk kota. Namun, warga menilai rencana perluasan akan menambah timbulnya dampak negatif seperti penurunan kualitas udara,

pencemaran dan muncul potensi masalah kesehatan. Warga merasa bahwa perluasan akan semakin mengganggu kenyamanan hidup mereka. Permasalahan wacana perluasan TPA menjadi konflik yang akan terus terjadi antara pemerintah dengan masyarakat jika tuntutan dari masyarakat terkait tidak dilakukannya perluasan lahan tidak dipenuhi oleh pemerintah.

Konflik antara pemerintah dengan masyarakat terkait dengan TPA Ngronggo sudah berlangsung dari tahun 2019 hingga tahun 2025. Warga sudah merasakan dampak negatif dari efek sampah selama bertahun-tahun tanpa ada penanganan yang dilakukan secara signifikan. Sehingga, konflik terus berkembang dan meningkat karena adanya permasalahan lain yang menambah ketegangan salah satunya yaitu penolakan wacana perluasan. Masyarakat sekitar TPA Ngronggo merasa bahwa mereka memiliki hak untuk hidup dengan layak dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Sehingga, wacana perluasan ini menuai penolakan dari masyarakat karena masyarakat memperjuangkan hak yang seharusnya mereka dapatkan untuk kehidupan yang layak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan mengenai permasalahan sampah di Kota Salatiga yang pada akhirnya menimbulkan konflik antara warga dengan pemerintah karena terbatasnya ketersediaan ruang Tempat Pembuangan Akhir (TPA) untuk menampung sampah, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana konflik yang terjadi antara pemerintah dengan masyarakat sekitar TPA Ngronggo Kota Salatiga dengan inti konflik yakni permasalahan perluasan TPA Ngronggo Kota Salatiga yang menjadi keresahan warga sekitar karena akan menimbulkan dampak yang lebih parah di kemudian hari serta bagaimana upaya penyelesaian

permasalahan yang dilakukan oleh pemerintah dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Terkait dengan uraian permasalahan yang telah dijabarkan di latar belakang, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana konflik TPA Ngronggo Kota Salatiga pada tahun 2024-2025?
2. Apa faktor penyebab terjadinya konflik antara masyarakat dengan pemerintah akibat dari wacana pemerintah untuk melakukan perluasan TPA Ngronggo Kota Salatiga?
3. Bagaimana upaya pemerintah Kota Salatiga untuk menyelesaikan konflik yang terjadi terkait perluasan TPA Ngronggo Kota Salatiga?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis konflik TPA Ngronggo Kota Salatiga tahun 2024-2025.
2. Menganalisis faktor penyebab konflik yang terjadi pada masyarakat terhadap wacana pemerintah untuk melakukan perluasan lahan pada TPA Ngronggo Kota Salatiga.
3. Menganalisis upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan konflik yang terjadi atas perluasan TPA Ngronggo Kota Salatiga.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan baik dari teori maupun aplikasi praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari pelaksanaan penelitian ini yaitu memberikan kontribusi bagi disiplin ilmu Pemerintahan dan memperkuat teori-teori ilmu Pemerintahan khususnya dalam isu tentang permasalahan sampah yang terjadi pada lingkungan perkotaan serta menambah wawasan mengenai konflik yang terjadi antara pemerintah dengan masyarakat sekitar TPA Ngronggo Kota Salatiga karena penolakan wacana perluasan TPA.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman secara mendalam mengenai akar penyebab terjadinya konflik sosial karena perluasan TPA Ngronggo. Penelitian ini dapat memberi dampak positif bagi pembangunan Kota Salatiga terutama dalam penanganan permasalahan sampah yang mengakibatkan terjadinya konflik serta kebijakan yang dapat dirancang pemerintah untuk menangani permasalahan yang terjadi. Mengingat seiring bertambahnya populasi penduduk, pemaparan di atas dapat menjadi referensi bagi pemerintah untuk dapat menentukan langkah konkrit yang dapat dilakukan dalam menangani permasalahan sampah.

1.5 Penelitian Terdahulu

Konflik sosial seringkali terjadi dalam kehidupan masyarakat akibat dari adanya kepentingan yang berbeda-beda. Konflik dapat terjadi karena adanya

ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat. Aspirasi dan keresahan masyarakat yang tidak didengar akan memicu konflik antara pemerintah dengan masyarakat. Permasalahan sampah yang tidak tertangani juga berkontribusi menjadi pemicu konflik. Pemerintah membutuhkan lahan tambahan untuk dapat menampung sampah setiap harinya, tetapi dengan melakukan perluasan TPA yang tidak dikehendaki masyarakat akan menjadi faktor terjadinya konflik sosial. Sehubungan dengan hal ini, berikut kajian-kajian yang telah dilakukan dan dijadikan acuan bagi penulis untuk menganalisis objek penelitian ini. Perbedaan saya dengan penelitian sebelumnya, dalam penelitian saya berfokus pada penyebab penolakan wacana perluasan oleh masyarakat sekitar TPA Ngronggo Kota Salatiga dan upaya-upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk dapat menyelesaikan konflik yang terjadi. Berikut penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang ingin saya tuliskan:

1. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2022 oleh Muhammad Rejendranad Reynaldo dan berjudul “Analisis Konflik Sosial Masyarakat Desa Sitimulyo Dalam Permasalahan Pengelolaan Sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan Kabupaten Bantul”.

Penelitian ini membahas mengenai konflik yang terjadi antara masyarakat yang tinggal disekitar TPA dengan pemerintah yang menjadi pengelola. Permasalahan ini bermula dari kelebihan muatan dari TPA sehingga memberi efek buruk terhadap lingkungan masyarakat yang tinggal disekitarnya. Konflik ini menyebabkan terjadinya penutupan akses menuju TPA sehingga terjadi penumpukan sampah di berbagai tempat. Tujuan dari

penelitian ini yaitu mengetahui bagaimana konflik antara masyarakat sekitar TPA dengan pengelola terjadi. Penelitian ini menggunakan teori Konflik yang dikembangkan oleh Lewis Alfred Coser sebagai acuan analisis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan pendekatan studi fenomenologi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya temuan dua jenis konflik yang terjadi secara bersamaan dalam konflik sosial masyarakat Desa Sitimulyo dalam permasalahan pengelolaan sampah di TPA yaitu konflik realistik dan non realistik. Konflik ini berawal dari kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah tentang TPA Piyungan. Selain itu, konflik yang terjadi memberi kontribusi positif kedua pihak dimana masyarakat dan Pemerintah Provinsi memiliki tingkat solidaritas yang tinggi setelah terjadinya konflik. Dalam konflik ini penyelesaian yang dilakukan dengan melakukan kesepakatan antara masyarakat dengan pemerintah untuk mencegah terjadinya konflik lagi.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Wildan Nafis pada Tahun 2020 dan berjudul “Penyelesaian Konflik Lingkungan dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bantul”.

Pada penelitian ini membahas mengenai faktor penyebab terjadinya konflik lingkungan karena pengelolaan sampah yang belum optimal di TPST Piyungan Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya konflik lingkungan pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul, menganalisis

kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam melakukan penyelesaian konflik yang terjadi dan mengembangkan resolusi konflik lingkungan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori konflik kebutuhan manusia, teori mediasi, teori pembangunan berkelanjutan dan teori kebijakan publik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data dikumpulkan pengamatan lapangan (participant observation) dan penelusuran literatur, kemudian diolah dan disusun secara deskriptif dan sistematis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab terjadinya konflik karena penyelesaian konflik tidak dilakukan dengan maksimal selama ini, tidak dilakukan langkah pencegahan konflik yang terpadu dan cepat. Selain itu, adanya sikap pembiaran yang dilakukan oleh pembangku kebijakan publik sehingga tidak terjalin komunikasi yang baik antara warga dengan pengelola TPST maupun dengan Pemerintah Daerah. Pengelola TPST Piyungan dinilai belum optimal dalam merespon kebutuhan sarana dan prasarana TPST Piyungan meskipun sudah ada kebijakan yang menaungi tetapi dalam pelaksanaannya seringkali sulit diterapkan karena minimnya pengawasan dan inovasi.

- 3. Penelitian selanjutnya dilakukan pada tahun 2022 oleh Rofiqi Naufal Azizi¹, Hamim Zakky Hadibashir, Rusnoto dan Ferry Dwi Cahyadi dengan judul “Analisis Kesesuaian Lahan untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah di Kabupaten Kudus Menggunakan Sistem Informasi Geografis”.**

Penelitian ini membahas mengenai kebutuhan lahan yang harus disediakan karena TPA Tanjungrejo Kabupaten Kudus mengalami overload dan memerlukan lokasi TPA baru. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kesesuaian lahan untuk TPA di Kabupaten Kudus menggunakan SIG, membuat pemodelan spasial untuk TPA yang baru menggunakan SIG dan menganalisis pendapat masyarakat Kabupaten Kudus terhadap hasil analisis kesesuaian lokasi TPA yang baru dari pemodelan SIG. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian deskriptif kuantitatif dengan melakukan penentuan lokasi untuk TPA di Kabupaten Kudus. Penentuan lokasi TPA ini ditentukan berdasarkan dengan SNI yang dianalisis dengan teknik Sistem Informasi Geografis yakni analisis buffer dan overlay dengan memanfaatkan software ArcGIS. Penentuan lokasi yang sesuai untuk dijadikan lokasi TPA baru menggunakan metode analisis kuantitatif. Rancangan penelitian ini, dapat untuk mengetahui lokasi baru untuk TPA sampah di Kabupaten Kudus sesuai dengan standar. Teknik probability sampling dengan metode random sampling digunakan dalam melakukan pengambilan sampel penelitian untuk mewawancarai responden mengenai pendapat terhadap lokasi TPA.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa evaluasi lahan pada TPA Tanjungrejo bahwa lokasi TPA sudah sesuai berdasarkan analisis kesesuaian lahan tetapi masih terdapat sebagian dari lokasi TPA yang kurang sesuai. Masyarakat menyetujui pemodelan lokasi TPA sebanyak 87% dan masyarakat yang tidak setuju sebanyak 13%. Masyarakat yang

setuju memiliki alasan bahwa sampah akan terkelola dengan baik, lingkungan menjadi lebih bersih dan mengurangi pencemaran lingkungan karena sampah tidak dibuang sembarangan pada sungai atau lainnya. Masyarakat yang memiliki pendapat tidak setuju beranggapan bahwa lokasi disekitar tempat tinggalnya akan terganggu dan menimbulkan bau yang tidak enak.

4. Penelitian selanjutnya dilakukan pada tahun 2022 oleh Farhan Fadillah dengan judul “Dampak Keberadaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus: TPA Cipayung Kota Depok Jawa Barat)”.

Penelitian ini membahas mengenai dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan akibat keberadaan TPA Cipayung. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori dampak sampah menurut Gilbert dan kondisi sosial ekonomi menurut Suratmo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan kualitatif deskriptif dengan melakukan wawancara, observasi langsung dan dokumentasi. Pada penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian studi kasus. Penelitian studi kasus adalah sebuah penelitian kualitatif yang berusaha menemukan makna, menyelidiki proses, dan memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam dari individu, kelompok, atau situasi. Studi kasus menjadi pilihan karena peneliti memiliki minat dan ketertarikan penuh dengan persoalan yang terjadi pada TPA Cipayung.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan TPA Cipayung memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar karena banyaknya masyarakat yang mendapatkan penghasilan utama dan penghasilan tambahan dari adanya TPA Cipayung dengan kisaran nominal penghasilan yaitu Rp 50.000,- hingga Rp 3.000.000,- dengan menjadi karyawan TPA, pemulung dan usaha warung. Namun, keberadaan TPA juga memberikan dampak negatif bagi warga sekitar karena menimbulkan pencemaran air, kesehatan warga yang menurun dan kualitas udara yang tidak baik.

5. Penelitian selanjutnya dilakukan pada tahun 2021 oleh Alan Baruna dengan judul “Evaluasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Ngronggo Berdasarkan Penilaian Indeks Risiko Lingkungan di Kelurahan Kumpulrejo dan Kelurahan Randuacir, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga Jawa Tengah”.

Penelitian ini membahas mengenai penerapan pengelolaan sampah yang terdapat di TPA Ngronggo dengan menggunakan metode penimbunan sampah *Controlled Landfill* tetapi dalam kenyataan di lapangan masih menerapkan metode *Open Dumping*. Hal tersebut berpotensi menimbulkan pencemaran serta mempengaruhi kualitas lingkungan yang ada di sekitar TPA Ngronggo. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan evaluasi kualitas lingkungan dengan penilaian Indeks Risiko Lingkungan dan merancang arahan pengelolaan sampah untuk TPA Ngronggo Kota Salatiga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengumpulan data

(metode survey dan pemetaan, serta wawancara), teknik sampling (purposive sampling dan grab sampling), dan analisis data (uji laboratorium, metode indeks pencemaran, dan metode pendekatan kuantitatif).

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan penilaian Indeks Rasio Lingkungan, TPA Ngronggo memiliki nilai sebesar 565,463 dan termasuk dalam tingkat bahaewa sedang. Berdasarkan hasil tersebut, TPA Ngronggo disarankan untuk meneruskan TPA serta melakukan rehabilitasi menjadi lahan urug terkendali.

6. Penelitian selanjutnya dilakukan pada tahun 2020 oleh Devi Sari Ramadaniarsih dengan judul “Konflik Sosial Antara Warga dan Petugas Pengelola TPA Sampah di Kecamatan Pontianak Utara”.

Penelitian ini membahas mengenai konflik yang terjadi di Kecamatan Pontianak Utara karena keberadaan TPA menyebabkan meluapnya limbah air lindi dan mencemari sumber air bersih bagi warga sekitar. Terjadi 3 kali konflik dalam permasalahan ini dimulai pada tahun 2017 hingga menyebabkan adanya aksi protes demo yang dilakukan oleh warga. Warga merasa terganggu dengan keberadaan TPA di lingkungan sekitar mereka yang menimbulkan pencemaran lingkungan. Tujuan dari penelitian ini yaitu adanya keresahan dari warga yang merasa terganggu dengan dampak yang ditimbulkan dari keberadaan TPA yang mengganggu kehidupan sehari-hari sehingga menimbulkan terjadinya konflik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan melakukan wawancara dan observasi secara langsung.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa konflik yang terjadi antara warga dengan Petugas Lembaga Pengelola TPA disebabkan adanya pencemaran air karena meluapnya air lindi ke sumber air warga pada musim hujan yang terbawa ke sungai. Air yang tercemar tidak dapat digunakan oleh warga untuk kehidupan sehari-hari sehingga aksi protes dilakukan oleh warga.

Secara keseluruhan, penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Berikut persamaan dan perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

Tabel 1.3
Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Analisis Konflik Sosial Masyarakat Desa Sitimulyo Dalam Permasalahan Pengelolaan Sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan Kabupaten Bantul	1. Objek yang diteliti sama-sama TPA. 2. Teori yang digunakan sama yaitu teori konflik.	1. Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi fenomenologi sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. 2. Lokasi penelitian sebelumnya di TPA Piyungan, dalam penelitian ini lokasi penelitian di TPA Ngronggo.
2.	Penyelesaian Konflik Lingkungan dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bantul	1. Metode penelitian menggunakan kualitatif deskriptif. 2. Objek yang diteliti sama-sama TPA.	1. Lokasi penelitian di TPST Piyungan, sedangkan penelitian ini berada di TPA Ngronggo. 2. Teori yang digunakan dalam penelitian ini teori konflik kebutuhan manusia, model resolusi lingkungan, teori pembangunan berkelanjutan. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan teori konflik sosial, penyebab konflik dan resolusi konflik.
3.	Analisis Kesesuaian Lahan untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah di Kabupaten Kudus Menggunakan Sistem Informasi Geografis	1. Metode penelitian menggunakan kualitatif deskriptif. 2. Objek penelitian sama-sama TPA.	1. Lokasi penelitian di TPA Kabupaten Kudus, sedangkan penelitian ini di TPA Ngronggo.
4.	Dampak Keberadaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah	1. Metode yang digunakan menggunakan	1. Teori yang digunakan. 2. Lokasi penelitian di TPA Cipayung, sedangkan

	Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus: TPA Cipayung Kota Depok Jawa Barat	kualitatif deskriptif. 2. Objek penelitian sama-sama TPA.	penelitian ini berada di TPA Ngronggo.
5.	Evaluasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Ngronggo Berdasarkan Penilaian Indeks Risiko Lingkungan di Kelurahan Kumpulrejo dan Kelurahan Randuacir, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga Jawa Tengah	1. Lokasi penelitian sama-sama TPA Ngronggo Kota Salatiga. 2. Objek penelitian sama-sama TPA.	1. Metode penelitian yang digunakan yaitu, pengumpulan data dan teknik sampling, sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif.
6.	Konflik Sosial Antara Warga dan Petugas Pengelola TPA Sampah di Kecamatan Pontianak Utara	1. Objek penelitian sama-sama TPA. 2. Metode penelitian menggunakan kualitatif deskriptif.	1. Lokasi penelitian berada di TPA Kecamatan Pontianak Utara, sedangkan penelitian ini berada di TPA Ngronggo.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Konflik

Istilah “konflik” secara etimologis berasal dari bahasa Latin “con” yang berarti bersama dan “fligere” yang berarti benturan atau tabrakan. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (1996) “konflik” diartikan sebagai pertengkaran, perselisihan dan benturan. Konflik menjadi sebuah proses sosial yang terjadi dalam suasana saling menantang, memberi ancaman dan perjuangan untuk mendapatkan keadilan. Konflik dapat muncul apabila terjadi suatu perbedaan baik perbedaan pandangan, pendapat, nilai, keinginan, kebutuhan,

kepentingan atau kebiasaan. Perbedaan yang tidak dapat teratasi dengan baik akan menimbulkan konflik baik individu atau sekelompok individu dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat.

Konflik merupakan kenyataan hidup yang tidak dapat dihindarkan dan terjadi pada saat suatu tujuan dari masyarakat tidak sejalan, terkadang konflik yang terjadi diselesaikan tanpa kekerasan serta menghasilkan situasi yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat. Konflik dapat timbul dalam kehidupan manusia karena terjadi ketidakseimbangan baik dari segi sosial, ekonomi dan kekuasaan yang mengalami pertumbuhan serta perubahan. Konflik merupakan hubungan antara dua pihak atau lebih baik individu maupun kelompok yang memiliki atau yang merasa memiliki sasaran-sasaran yang tidak sejalan (Fisher, 2001: 3-4).

Menurut Killman dan Thomas (1978), konflik merupakan kondisi terjadinya ketidakcocokan antar nilai atau tujuan-tujuan yang ingin dicapai, baik yang ada dalam diri individu maupun dalam hubungannya dengan orang lain. Konflik adalah sebuah proses yang dimulai ketika satu pihak memiliki persepsi dimana pihak lain sudah mempengaruhi secara negatif, sesuatu yang telah membuat kepedulian akan kepentingan bersama (Robbins, 2008: 173).

Menurut Surbakti (1999:149) menyatakan bahwa konflik sering memiliki makna benturan seperti perbedaan pendapat, persaingan atau pertentangan antara individu dengan individu, individu dengan

kelompok, serta antara individu atau kelompok dengan pemerintah. Demikian pula yang dikemukakan oleh Simmel (dalam Poloma 2003:107) bahwa konflik merupakan bentuk interaksi di mana tempat, waktu, intensitas dan lain sebagainya tunduk pada perubahan, sebagaimana dengan isi segitiga yang dapat berubah.

Menurut Coser (dalam Zeitlin 1998:156) bahwa konflik sosial merupakan suatu perjuangan terhadap nilai dan pengakuan terhadap status yang langka, kemudian kekuasaan dan sumber-sumber pertentangan dinetralisir atau dilangsungkan, atau dieliminir saingan-saingannya. Pandangan Coser tersebut dipahami sebagai adanya bentuk pertentangan terhadap nilai, diskriminasi dan adanya sikap penindasan (*oppression*) terhadap kaum lemah (*prolitter*). Gagasan Coser merupakan penyempurnaan dari pandangan George Simmel mengenai konflik, dimana Simmel memandang konflik sebagai bentuk interaksi dimana tempat, waktu, serta intensitas dan lainnya tunduk kepada perubahan (Poloma,2010).

Menurut Coser, konflik memiliki potensi positif dalam membentuk dan mempertahankan struktur masyarakat. Coser menjelaskan bahwa terdapat keuntungan atau sisi positif dari adanya konflik dimana konflik dapat memperkuat struktur dalam masyarakat saat terjadi gesekan dari kelompok luar (*out group*).

Lewis A. Coser seperti dikutip oleh Joseph P.Folger dan Marshal S. Poole (1984) membagi konflik menjadi dua yaitu sebagai berikut:

- a. Konflik Realistis, berasal dari perbedaan dan ketidaksepahaman cara untuk mencapai tujuan atau mengenai tujuan yang akan dicapai. Dalam jenis konflik ini, interaksi konflik memfokuskan pada isu ketidaksepahaman mengenai substansi atau objek konflik yang seharusnya diselesaikan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Pada konflik ini, metode manajemen konflik yang digunakan adalah dengan menggunakan dialog, persuasi, musyawarah, voting, dan negosiasi.
- b. Konflik Non-Realistis, konflik yang terjadi tidak berhubungan dengan isu substansi penyebab konflik. Konflik ini terjadi dipicu karena kebencian atau prasangka terhadap lawan konflik yang mendorong untuk melakukan agresi untuk dapat mengalahkan atau menghancurkan lawan konfliknya. Penyelesaian perbedaan pendapat mengenai isu penyebab konflik tidaklah menjadi hal yang penting. Hal penting yang menjadi fokus adalah bagaimana untuk bisa mengalahkan lawan. Pada konflik ini, metode manajemen konflik yang digunakan adalah agresi dengan menggunakan kekuasaan, kekuatan dan paksaan.

Secara keseluruhan, konflik realistis dan non realistis terdapat perbedaan dalam penyebab terjadinya konflik. Dalam konflik realistis terjadi karena adanya perbedaan dan ketidaksepahaman dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan, pada konflik non realistis terjadi dipicu karena adanya kebencian dan prasangka terhadap

lawan konflik yang mendorong untuk mengalahkan lawan konflik dengan agresi.

1.6.2 Penyebab Konflik

Perbedaan kepentingan (*interest*) dapat menjadi sumber terjadinya konflik. Satu pihak dapat bertentangan dengan pihak lain dapat menjadi pemicu terjadinya konflik yang didorong karena adanya aspirasi yang tidak di dengar. Konflik pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial termasuk konflik yang terjadi antara masyarakat dengan pemerintah. Perbedaan kepentingan anantara pemerintah dengan masyarakat dapat menciptakan ketegangan diantara kedua pihak. Aspirasi masyarakat yang tidak di dengar pemerintah akan menimbulkan kekecewaan bagi masyarakat.

Konflik dapat muncul apabila salah satu pihak memiliki aspirasi tinggi atau karena alternatif sulit untuk diperoleh. Hal ini dipertegas bahwa memang konflik sumbernya ada pada pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar manusia (Susan,2012). Setiap kepentingan memiliki tujuan pada pemenuhan kebutuhan dasar, semakin sederhana dimensi kebutuhan dasar maka hal yang diperebutkan pihak-pihak berkonflik proses penyelesaiannya akan cepat tercapai. Sebaliknya, jika pemenuhan kebutuhan dasar semakin kompleks maka penyelesaian konflik akan semakin rumit.

Konflik muncul karena adanya ketidaksepahaman yang terjadi antara kedua belah pihak. Dalam penelitian ini, konflik yang terjadi

adalah konflik vertikal antara pemerintah dengan masyarakat. Konflik vertikal merupakan konflik antar komponen masyarakat di dalam suatu struktur yang memiliki hierarki. Kepentingan antara masyarakat dengan pemerintah tidak sejalan sehingga masyarakat merasa pemerintah bertindak sewenang-wenang tanpa mendengarkan aspirasi dan keresahan masyarakat.

Konflik tidak muncul begitu saja melainkan terdapat faktor-faktor penyebab yang melatarbelakangi munculnya konflik. Terjadinya konflik disebabkan oleh berbagai faktor. Menurut (Dr. Benjamin M. , 2017) adapun faktor penyebab konflik dapat dibedakan dalam berbagai jenis, yaitu :

a. *Triggers* (pemicu)

Peristiwa yang memicu terjadinya suatu konflik.

b. *Pivotal factors or root casues* (faktor inti atau penyebab dasar)

Faktor inti dari terjadinya konflik atau akar konflik yang perlu ditangani supaya pada akhirnya dapat mengatasi konflik yang terjadi.

c. *Mobilizing factors* (faktor yang memobilisasi)

Masalah-masalah yang memobilisasi kelompok untuk melakukan tindakan perlawanan.

d. *Aggravating factors* (faktor yang memperburuk)

Faktor tambahan yang memperburuk terjadinya konflik.

1.6.3 Resolusi Konflik

Resolusi konflik memiliki makna sebagai suatu proses analisis dalam melakukan penyelesaian masalah dengan mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan individu dan sekelompok individu. Resolusi konflik juga menjadi suatu proses untuk mencapai keluaran konflik dengan menggunakan metode resolusi konflik. Metode resolusi konflik ini merupakan proses manajemen konflik yang dipakai untuk menghasilkan keluaran konflik (Dr. Benjamin M. , 2017).

Penyelesaian konflik menjadi hal yang sangat diperlukan saat terjadi konflik. Terkadang konflik yang terjadi dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak yang berkonflik secara langsung tanpa melibatkan pihak lain. Namun, disisi lain penyelesaian konflik tidak jarang harus melibatkan pihak ketiga untuk menegahi konflik dan mengusakan solusi atau jalan keluar sebagai resolusi konflik dalam upaya menyelesaikan konflik yang terjadi.

Dalam proses resolusi konflik agar terjadi suatu penyelesaian Fisher (2000: 112-113) menyatakan bahwa perlu adanya :

a. Memfasilitasi Dialog

Di dalam proses mengelola konflik diperlukan usaha-usaha untuk mendapatkan berbagai cara dalam meningkatkan terjadinya dialog diantara pihak-pihak yang berkonflik (Fisher 2001;113). Terkadang dialog menjadi hal yang diabaikan saat kondisi emosi memuncak.

Dialog menjadi keterampilan yang berguna di awal sebelum situasi konflik berkembang sampai pada tahap krisis atau puncak.

b. Negosiasi

Keterampilan negosiasi dalam situasi konflik maka negosiasi dapat diartikan sebagai suatu proses terstruktur yang digunakan oleh pihak-pihak yang berkonflik untuk melakukan dialog berkaitan dengan isu-isu dimana masing-masing pihak mempunyai pendapat yang berlawanan (Fisher, 2001:115). Negosiasi berlangsung diantara kedua belah pihak yang berkonflik pada tahap awal suatu konflik dimana pada saat jalur komunikasi anantara kedua pihak belum benar-benar terputus.

c. Mediasi

Mediasi menjadi bagian dari penyelesaian konflik yang telah lama diterapkan dengan tujuan untuk dapat menyelesaikan konflik yang terjadi. Mediasi diterapkan dalam menyelesaikan konflik di berbagai hal termasuk konflik sosial. Tujuan dilakukannya mediasi adalah mencapai kesepakatan atau solusi tentang objek konflik yang dibantu oleh seorang mediator. Mediator berfungsi sebagai fasilitator bukan sebagai pengambil keputusan.

d. Arbitrase

Arbitrase menjadi alternatif yang diterapkan dalam menyelesaikan persoalan konflik yang terjadi. Penggunaan arbitrase dianggap lebih cepat dan biayanya lebih murah serta bagi kedua belah pihak yang

berkonflik bisa mengontrol resolusi konflik yang dihasilkan dari proses arbitrase. Menurut Cristopher W. Moore (2003) menyatakan arbitrase dalam istilah umum adalah suatu proses di mana seseorang diminta bantuannya dalam konflik secara sukarela sebagai pihak ketiga yang tidak memihak dan netral untuk membuat keputusan bagi mereka yang berkonflik mengenai isu-isu yang dipermasalahkan.

1.7 Operasionalisasi Konsep

Penelitian ini menggunakan konsep konflik sosial oleh Lewis A. Coser, penyebab konflik dan strategi penyelesaian konflik. Definisi konsep-konsep tersebut sebagai berikut:

1.7.1 Dinamika Konflik

Dinamika konflik menjadi suatu kondisi yang seringkali mengalami fluktuatif dari waktu ke waktu. Konflik adalah suatu proses sosial yang terjadi dalam situasi saling menentang dan berusaha untuk mendapatkan apa yang menjadi keadilan bersama. Dalam penelitian ini, konflik yang terjadi yaitu konflik vertikal antara masyarakat dengan pemerintah. Konflik vertikal adalah konflik yang terjadi antar komponen masyarakat dalam struktur yang memiliki hierarki (Alwi, 2016). Konflik dalam penelitian ini, dianalisis menggunakan teori konflik menurut Lewis A. Coser dan dengan menggunakan beberapa indikator sebagai berikut:

1. Penyebab konflik

Munculnya suatu konflik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat tidak akan lepas dari faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya konflik. Menurut (Dr. Benjamin M. , 2017) faktor penyebab konflik diantaranya trigger (faktor pemicu), pivotal factors or root causes (faktor inti), mobilizing factors (faktor yang memobilisasi), dan aggravating factors (faktor yang memperburuk terjadinya konflik).

2. Resolusi konflik

Dalam upaya penyelesaian konflik diperlukan adanya sebuah resolusi konflik. Menurut (Fisher 2000: 112-113) proses resolusi konflik memerlukan yaitu dialog, negosiasi, mediasi dan arbitrase. Proses-proses ini dilakukan dengan tujuan penyelesaian suatu konflik secara damai. Dalam penelitian ini, penyelesaian konflik dilakukan melalui adanya proses resolusi konflik. Melalui dialog yang terjadi maka komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat akan terjalin untuk meminimalisir terjadinya kesalahpahaman. Proses negosiasi, mediasi dan arbitrase juga menjadi proses yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan pendekatan dengan masyarakat tanpa adanya kekerasan sehingga proses komunikasi atau tawar-menawar kedua pihak terjalin dengan baik.

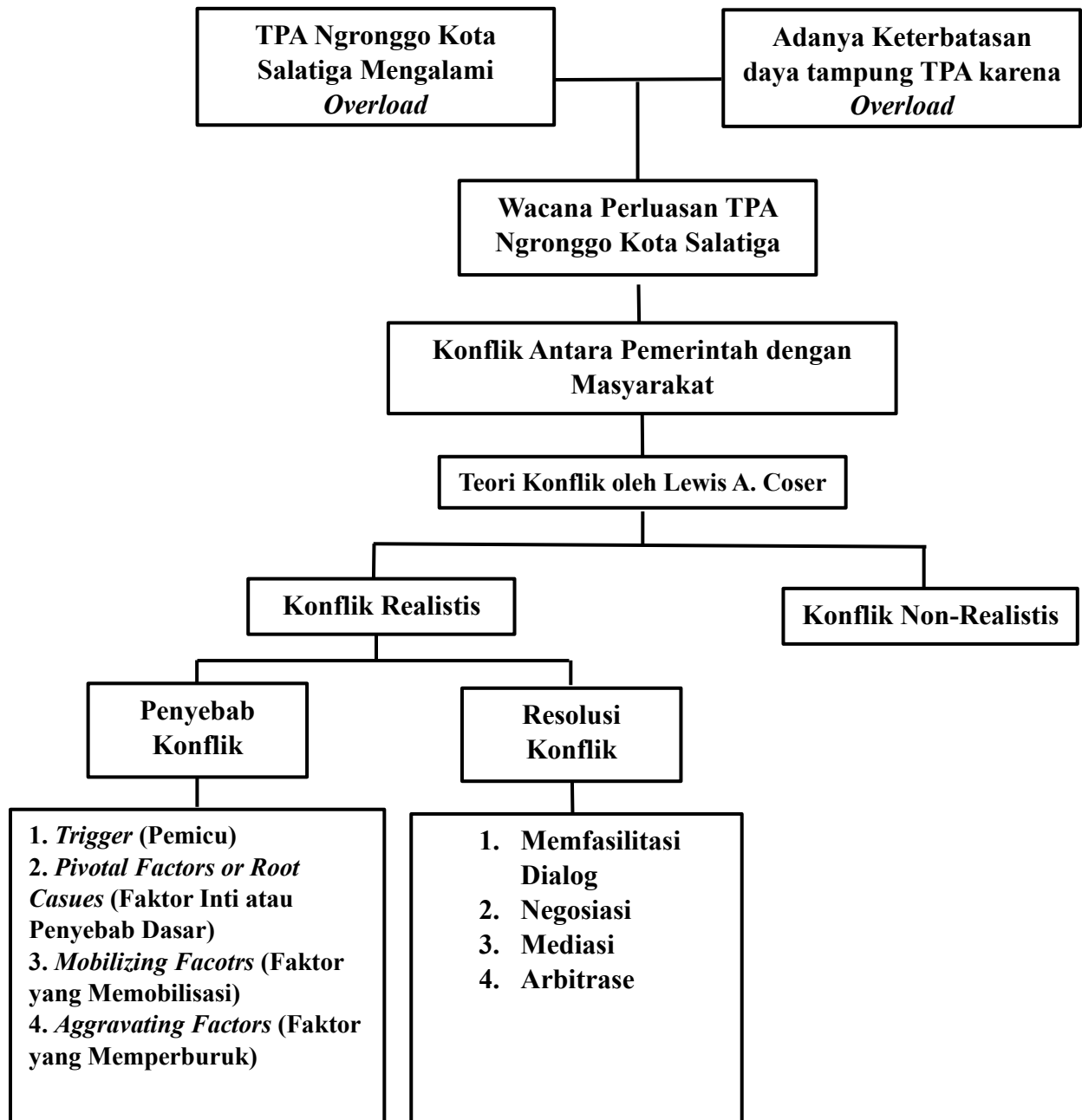
1.7.2 Tempat Pembuangan Akhir (TPA)

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) adalah suatu lokasi yang digunakan untuk menampung, mengelola dan menghancurkan sampah dengan metode-metode yang sesuai sehingga dampak buruk yang ditimbulkan dari sampah dapat dikurangi sebaik mungkin. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, TPA merupakan tempat untuk memproses atau mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan. TPA merupakan tempat dimana sampah mencapai tahap terakhir dalam pengelolaannya yang dimulai dari pengumpulan, pemindahan/ pengangkutan, pengelolaan dan pembuangan.

Penanganan sampah di Kota Salatiga ditangani dengan melalui pengangkutan dan pembuangan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Ngronggo. *Control Landfill* menjadi sistem yang penanganan sampah yang digunakan oleh TPA Ngronggo. Umur TPA Ngronggo yang tidak lama menjadi bukti bahwa penanganan sampah belum dilakukan dengan maksimal. Selain itu, daya tampung TPA yang sudah melebihi ambang batas menjadi hal yang perlu untuk diperhatikan.

1.8 Kerangka Berpikir

Gambar 1.1
Bagan Kerangka Berpikir



Sumber: Diolah Peneliti

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Tipe Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang diteliti, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu metode yang ditujukan untuk mengeksplorasi dan memahami makna suatu fenomena (Creswell, 2009: 126). Penelitian kualitatif menjadi sebuah metode penelitian yang digunakan untuk mengeksplorasi fenomena yang ada dalam suatu konteks secara alamiah. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk mendapatkan suatu data yang akan diteliti dan dibahas menggunakan kata-kata yang memiliki tujuan untuk menjelaskan fenomena secara detail dan mendalam. Data yang diperoleh digunakan untuk menyusun dan memperkuat penelitian yang dilakukan. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci (Sugiyono: 2005). Dalam penelitian kualitatif peneliti memiliki peran penting dalam terjadinya proses penelitian.

Pendekatan kualitatif yang digunakan pada penelitian ini adalah tipe penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif berusaha menyajikan gambaran mengenai situasi riil serta menghasilkan makna dan implikasi atas suatu masalah yang ingin dipecahkan (Nazir, 1014: 47). Penelitian kualitatif deskriptif menjadi penelitian yang digunakan untuk menggambarkan permasalahan

dengan detail melalui deskripsi. Menurut Moleong (2005: 6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Oleh karena itu, dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif peneliti akan melakukan penggambaran objek dimaulai dari pemicu atau penyebab terjadinya hingga resolusi konflik sesuai dengan keadaan yang sebenarnya melalui data-data yang diperoleh. Fakta, data, fenomena dan kegiatan yang dilaksanakan dianalisis dengan cara deskriptif hingga mencapai suatu kesimpulan dalam penelitian. Metode kualitatif deskriptif diharapkan dapat membantu penelitian yang dilakukan di Kota Salatiga khususnya untuk mendalami dinamika konflik yang terjadi atas wacana pemerintah untuk melakukan perluasan TPA Ngronggo Kota Salatiga.

1.9.2 Situs Penelitian

Situs atau lokasi penelitian berada di Kota Salatiga tepatnya pada Desa yang menjadi lokasi keberadaan TPA yaitu Desa Ngronggo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga. Desa Ngronggo dipilih sebagai situs penelitian karena lokasi ini menjadi tempat terjadinya konflik antara pemerintah dengan masyarakat. Konflik terjadi karena adanya

ketidaksepahaman tujuan antara pemerintah dengan masyarakat terkait adanya wacana perluasan TPA yang tidak dikehendaki oleh masyarakat. Wacana perluasan TPA oleh pemerintah mendapatkan penolakan dari warga setempat karena dampak negatif yang ditimbulkan dari keberadaan TPA.

1.9.3 Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Pihak-pihak tersebut dapat berupa individu maupun kelompok yang mampu menceritakan atau memberikan informasi secara detail. Sejalan dengan hal ini, pihak yang mampu menjelaskan terkait dengan dinamika konflik atas wacana pemerintah untuk melakukan perluasan TPA Ngronggo yang menyebabkan adanya penolakan dari masyarakat atas wacana tersebut sebagai berikut.

Tabel 1.4 Data Informan

No	Nama Informan	Jabatan
1.	Informan 1: Alexander Joko SBY, S.E.	Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Salatiga
2	Informan 2: Yusvian Erianto, S.I.P., M.M.	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
3.	Informan 3: Eka Petra Buana DS, S.T.	Kepala UPTD TPA Ngronggo Kota Salatiga
4.	Informan 4: Anwar	Masyarakat sekitar TPA Ngronggo Kota Salatiga
5.	Informan 5: Amin	Masyarakat sekitar TPA Ngronggo Kota Salatiga
6.	Informan 6: Shiva	Masyarakat sekitar TPA Ngronggo Kota Salatiga

1.9.4 Jenis Data

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif sehingga jenis data yang disajikan cenderung menggunakan rangkaian kata, urutan peristiwa, foto, tindakan dan uraian naskah secara detail. Hal ini dilakukan karena aktivitas manusia seperti perilaku, tindakan dan gagasan yang diteliti tidak dapat diukur dengan angka. Data yang diperoleh dalam penelitian menjadi penguat argumen peneliti.

1.9.5 Sumber Data

Dalam penelitian yang berfokus pada dinamika konflik atas wacana perluasan TPA Ngronggo antara pemerintah dengan warga terdapat dua jenis sumber data yang digunakan untuk membangun dan memperkuat analisis penelitian, diantaranya sebagai berikut:

1. Data Primer

Sebagai sumber data utama yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dan hasil yang diperoleh dari proses pengumpulan data di lapangan dengan informan-informan yang berkaitan dengan penelitian ini. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara yang diperoleh oleh peneliti dengan narasumber atau informan yang telah ditentukan dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti serta observasi yang dilakukan oleh peneliti.

2. Data Sekunder

Sebagai data yang diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung atau melalui sumber data-data yang telah tersedia. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder diperoleh melalui laporan, dokumen yang menunjang, informasi dan kepustakaan dari berbagai media yang menyediakan, mendukung, dan memiliki hubungan dengan topik yang diteliti. Sehingga, data sekunder yang diperoleh oleh peneliti menjadi pendukung data-data primer yang telah ditemukan untuk mencapai argumen dan analisis yang kuat.

1.9.6 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa teknik yang digunakan untuk memperoleh dan menghimpun data serta informasi dengan jelas dan akurat. Beberapa teknik pengumpulan data yang dilakukan sebagai berikut:

1. Wawancara

Teknik wawancara menjadi teknik untuk memperoleh dan mengumpulkan data yang digunakan sebagai upaya memenuhi sumber data primer dalam penelitian yang dilakukan. Wawancara adalah proses tanya jawab yang mengarah pada suatu tujuan tertentu, seperti tujuan penelitian untuk menggali (membangkitkan) informasi penting yang relevan dengan fokus penelitian kualitatif yang dikaji (Berg, 2001). Teknik wawancara dilakukan dengan dialog interaktif yang terjadi antara peneliti dengan informan atau

narasumber yang terkait serta didasarkan pada panduan wawancara atau *interview guide*.

Menurut Moloeng (2006: 186) wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, yang melibatkan dua pihak yaitu pewawancara yang memberikan suatu pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan itu. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan tatap muka secara langsung antara peneliti dengan informan atau narasumber yang telah ditentukan. Panduan dalam melakukan wawancara berisi pertanyaan dengan format jawaban terbuka agar informan dapat memberikan pemikiran dan persepsi atas peristiwa serta fakta yang berkaitan dengan topik penelitian. Proses pelaksanaan wawancara dilakukan dengan peneliti memberikan pertanyaan, mendengarkan jawaban informan, merekam jawaban, dan menindaklanjuti atau menganalisis jawaban yang telah diberikan oleh informan.

2. Observasi

Menurut (Creswell, 2017: 266) observasi dalam penelitian kualitatif merupakan observasi kualitatif yang didalamnya peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati berbagai sikap/ perilaku dan aktivitas dari individu-individu di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan observasi di lapangan secara langsung dengan tujuan memperoleh data dan mengetahui keadaan lokasi secara langsung. Observasi dilakukan dengan mencatat hal-

hal penting yang berhubungan dengan topik dan menganalisis mengenai objek penelitian. Observasi dilakukan untuk mengetahui keadaan lokasi secara riil berdasarkan fakta yang ditemukan selama melakukan observasi.

3. Literatur

Perolehan data dilakukan melalui pengumpulan kepustakaan yang berkaitan dan sesuai dengan topik penelitian. Kepustakaan yang digunakan meliputi buku, dokumen, laporan, jurnal dan berita yang berkaitan untuk memecahkan permasalahan penelitian.

4. Dokumentasi

Dokumen adalah catatan atau peristiwa yang telah berlalu, yang bisa berbentuk tulisan, gambar/foto atau karya monumentak seseorang (Sugiyono, 2016: 82). Dalam proses pelaksanaan penelitian, dokumentasi diperlukan oleh peneliti sebagai bukti pendukung dalam penelitiannya. Dalam penelitian ini, dokumentasi diperoleh dari tempat penelitian secara langsung berupa foto, catatan, laporan kegiatan dalam penelitian yang dilakukan.

1.9.7 Analisis dan Interpretasi Data

Terdapat enam tahapan dalam melakukan analisis data (Creswell, 2016). Enam tahapan analisis data dalam penelitian tersebut sebagai berikut:

Tahap pertama, mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Dalam tahap ini melibatkan transkripsi wawancara, scanning

materi, mengetik data yang ada di lapangan, memilah dan menyusun data dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi yang di dapatkan.

Tahap kedua, membaca keseluruhan data. Pada langkah ini yang perlu untuk dilakukan yaitu dengan membangun general sense atas informasi yang telah didapatkan dan merefleksikan makna informasi secara keseluruhan. Pada tahap ini, peneliti cenderung menulis catatan-catatan khusus atau gagasan tentang data yang diperoleh.

Tahap ketiga, melakukan *Coding* pada semua data. Dalam tahap ini melibatkan pengambilan data berupa tulisan atau gambar yang telah dikumpulkan selama proses pengumpulan data, mengsegmentasi kalimat atau gambar ke dalam kategori, kemudian melabeli kategori ini dengan istilah khusus.

Tahap keempat, menerapkan proses *coding* untuk mendeskripsikan *setting* (ranah), orang (partisipan), kategori dan tema yang akan dianalisis. Pada tahap ini melibatkan upaya penyampaian informasi secara detail mengenai orang, lokasi atau peristiwa dalam *setting* (ranah) tertentu. Setelah itu, menerapkan proses coding untuk membuat sejumlah kecil tema atau kategori, biasanya bisa lima hingga tujuh kategori.

Tahap kelima, menyajikan data dalam narasi/laporan kualitatif. Pendekatan yang paling populer merupakan pendekatan naratif dalam menyampaikan hasil analisis. Pendekatan ini meliputi pembahasan

terkait dengan kronologi peristiwa, tema tertentu (lengkap dengan beberapa subtema, ilustrasi khusus, perspektif, dan kutipan) atau tentang keterhubungan antartema. Para peneliti juga cenderung menggunakan visual, gambar, atau tabel untuk menyajikan pembahasan. Dalam tahap ini, analisis dapat disajikan dengan suatu proses, menggambarkan secara spesifik lokasi penelitian atau memberikan informasi deskriptif tentang partisipan dalam sebuah tabel.

Tahap keenam, interpretasi dalam penelitian kualitatif atau memaknai data. Interpretasi dapat berupa makna yang berasal dari perbandingan antara hasil penelitian dengan informasi yang berasal dari literatur atau teori. Dalam hal ini, peneliti menegaskan apakah hasil penelitiannya membenarkan atau justru menyangkal informasi sebelumnya. Interpretasi ini juga dapat berupa pertanyaan baru yang perlu dijawab, pertanyaan yang muncul dari data dan analisis serta bukan dari hasil ramalan peneliti.

1.9.8 Kualitas Data

Kualitas data yang baik diperlukan dalam sebuah penelitian. Untuk menghasilkan kualitas data yang baik maka digunakan triangulasi sebagai teknik untuk menjamin kredibilitas hasil penelitian. Validitas merupakan salah satu kekuatan penelitian kualitatif dan didasarkan pada penentuan apakah temuan yang didapat akurat dari sudut pandang peneliti, partisipan atau pembaca (Cresswell & Miller, 2000). Triangulasi merupakan salah satu proses yang harus dilalui oleh

seorang peneliti disamping proses lainnya, dimana proses ini menentukan aspek-aspek validitas dari informasi yang diperoleh untuk kemudian disusun dalam suatu analisis penelitian (Prof. Dr. Sapto Haryoko, 2020). Triangulasi bukan hanya sekedar mencari kebenaran data-data, tetapi juga bertujuan meningkatkan pemahaman peneliti terhadap data dan fakta yang dimiliki (Stainback dalam Sugiyono, 2017:330).

Dalam penelitian ini, teknik triangulasi yang digunakan menggunakan triangulasi subjek, teknik, dan sumber data. Adapun cara yang dilakukan dalam triangulasi data penelitian ini yaitu:

a. Trianggulasi Subjek

Trianggulasi subjek berupa penggunaan individu atau kelompok untuk memperoleh sumber informasi yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini, triangulasi subjek melibatkan:

1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas permasalahan lingkungan dan persampahan sehingga dapat memberikan informasi secara detail dan mendalam terkait permasalahan yang diteliti.
2. Komisi C DPRD Kota Salatiga sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap bidang lingkungan hidup di Kota Salatiga sehingga Komisi C DPRD Kota Salatiga dapat memberikan informasi rencana-rencana

yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan TPA Ngronggo.

3. Masyarakat sebagai pihak yang dapat memberikan pandangan terkait permasalahan yang diteliti karena masyarakat menjadi komponen utama yang merasakan secara langsung dampak dari keberadaan TPA Ngronggo.

b. Triangulasi Teknik

Pendekatan yang digunakan dalam pengumpulan data untuk memberikan gambaran secara mendalam dan lengkap. Dalam penelitian ini, triangulasi teknik yang digunakan sebagai berikut :

1. Wawancara : pengumpulan data diperoleh melalui wawancara dengan informan atau narasumber yang mengerti terkait permasalahan yang terjadi.
2. Observasi : observasi dilakukan untuk mengamati objek secara langsung sehingga peneliti mendapatkan data dari lapangan.
3. Dokumentasi : dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data secara langsung dari tempat penelitian yang dapat berupa catatan, laporan atau foto.

c. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber digunakan untuk mengukur kualitas data dengan membandingkan keakuratan informasi atas data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi dengan berbagai sumber lain. Dalam penelitian ini, peneliti menguji data

menggunakan yang diperoleh berdasarkan wawancara dan observasi yang dilakukan. Kemudian membandingkan hasil wawancara dengan dokumen dan data-data yang tersedia.